

## Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Rico Putra<sup>1)</sup>; Surya Hidayat<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

<sup>2)</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

### Abstract

The purpose of this study was to analyze: 1) The level of local financial independence Jambi Province; and (2) Relationship level of local financial independence Jambi Province with economic growth. The results showed that: 1) The level of local financial independence Jambi province is still low; 2) There is no significant relationship between the ratios of local financial independence (the degree of fiscal decentralization, the dependency ratio, the ratio of the independence and effectiveness PAD) with economic growth.

*Keywords: local financial independence, fiscal decentralization, economic growth*

### Abstrak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi; dan (2) Hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah; 2) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rasio-rasio kemandirian keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan efektivitas PAD) dengan pertumbuhan ekonomi.

*Kata Kunci: kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi*

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomi, yang pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Maka pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, oleh sebab itu dengan diterapkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah maka setiap daerah dapat melaksanakan wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk penyelenggaraan pembangunan suatu daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan antara lain *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita di suatu daerah (Sjafrijal. 1997).

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) indikatornya adalah *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Peningkatan pertumbuhan PDRB suatu daerah menandakan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah juga bertambah sehingga akan mempengaruhi penerimaan daerah terutama dari sektor pajak, dimana PDRB

mengambarkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan salah satu komponen yang sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang dalam pengelolaan keuangan masih timbul masalah, hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik serta juga merupakan tuntutan reformasi. Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan penuh pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Keuangan daerah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan, oleh sebab itu Undang-Undang tersebut merupakan acuan dan memberikan wewenang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya. Hakikat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan keuangan daerah agar semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan hanya terkait dengan pembiayaan tetapi juga dalam hal kemampuan pengelolaan daerah.

Menurut (Reksohadiprojo, 2000), secara nyata bahwa kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang bersangkutan, seberapa besar kontribusi masing-masing komponen terhadap total penerimaan daerah yang mana merupakan indikator kekuatan suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintah di daerah. Adanya perbedaan sumber daya alam (SDA) bagi setiap daerah akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima guna membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin kecil ketergantungan daerah tersebut terhadap sumber-sumber penerimaan lain seperti bantuan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber pembangunan pelaksana desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Dalam meningkatkan penerimaan daerah, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun upaya peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara usaha untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada, serta melakukan pengalokasian yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (Undang-Undang No. 32/2004). Terlepas dari itu, transfer dana dari pusat juga diharapkan pemerintah bisa lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang didapatnya untuk membiayai pengeluaran di daerahnya.

Mengingat besarnya dukungan pendanaan dalam pengelolaan anggaran untuk menjalankan urusan/kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah, maka selaras dengan esensi otonomi daerah, besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut harus dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan

prioritas daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik), sehingga diharapkan *local government spending* tersebut akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan, hal ini antara lain terlihat dari PDRB sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi regional, dimana setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pertumbuhan, PDRB menunjukkan variasi antar daerah yang masih relatif tinggi. Hal tersebut memperlihatkan indikasi awal bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Dimana keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Pelaksanaan pembangunan juga menghadapi beberapa kendala diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan adanya keterbatasan sumber dana pembangunan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menyangkut kualitas yang masih rendah, kemajuan teknologi dan informasi lebih cepat daripada kemajuan sumber daya yang ada, akibatnya banyak daerah yang tidak menunjukkan perkembangan perekonomian yang berarti sementara itu keterbatasan dalam sumber dana pembangunan membuat ketimpangan antar masing-masing daerah kabupaten/kota, dimana terdapat daerah yang memiliki sumber dana pembangunan yang tinggi tetapi ada juga yang daerah memiliki sumber dana pembangunan yang rendah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah (Halim, 2004).

Sedangkan gambaran kemandirian keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2002) dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Hal ini tercermin dari kontribusi pendapatan asli daerah untuk mendanai belanja-belanja daerahnya dan kontribusi transfer pusat-daerah yang semakin menurun. Akan tetapi saat ini masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah daerah terkait upaya meningkatkan penerimaan daerah salah satunya antara lain tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan *fiscal gap*.

Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja

modal yang signifikan, hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Sedangkan bantuan pemerintah pusat antara lain penerimaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dari otonomi khusus dan juga pinjaman.

Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan restribusi daerah dan lain-lain, suatu pembangunan daerah bisa terwujud apabila disertai kemandirian daerah yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, restribusi dan sebagainya. Selama ini pemerintah daerah juga masih bergantung pada pemerintah pusat dalam mendukung pendanaan pembangunan. Kemampuan daerah untuk melaksanakan pembangunan dengan kemampuannya sendiri belumlah sampai pada tahap mandiri secara keuangan. Untuk pembangunan dalam skala besar masih bergantung pada dukungan transfer dari pemerintah pusat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sistematis dan telah diolah dan dipublikasikan. Penelitian ini dikumpulkan dari berbagai instansi dan lembaga yang ada kaitan dengan penelitian ini, instansi dan lembaga tersebut antara lain adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, untuk data pertumbuhan ekonomi yaitu tentang pertumbuhan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta dari berbagai instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Model Analisis**

#### ***Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah***

Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi, digunakan rumus sebagai berikut :

#### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, dengan menggunakan skala interval sebagai berikut :

Derajat Desentralisasi (%)	Kemandirian
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.237.1996

Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$RDDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : (Mahmudi, 2010).

$$Ketergantungan\ Keuangan\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula rasio kemandirian menurut Mahmudi (2010) adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Derajat Desentralisasi (%)</b>	<b>Kemandirian</b>
Rendah Sekali	0% – 25%	Instruktif
Rendah	25% – 50%	Konsultatif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2001)

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahmudi (2010), adalah :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x > 100%) berarti efektif.

### Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menganalisis hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dengan pertumbuhan ekonomi, digunakan alat uji korelasi sederhana pearson. Korelasi pearson, diformulasikan sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2) - \sqrt{(n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dimana :

- $r_{xy}$  = nilai korelasi antara  $x_i$  dan  $y_i$
- $n$  = jumlah periode
- $x_i$  = kemandirian keuangan
- $y$  = pertumbuhan ekonomi

Besarnya koefisien korelasi (r) antara dua buah variabel (y dan x) adalah nol sampai  $\pm 1$ . Apabila dua buah variabel (x dan y) mempunyai nilai  $r = 0$  berarti variabel-variabel tersebut tidak ada hubungan. Apabila variabel-variabel itu mempunyai  $r = \pm 1$ , maka kedua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan yang sempurna. Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel x dan y (variabel bebas dan terikat), digunakan tabel interpretasi koefisien korelasi dalam sugiyono (2000;149) sebagai berikut :

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendayagunaan potensi tersebut harus dalam batas-batas kewajaran, yang tolak ukurnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah di satu sisi, sedangkan di sisi lain adalah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menanggung beban pungutan pajak daerah dan redistribusi daerah.

Berdasarkan Tabel 1 Rata-rata Pendapatan Asli daerah (PAD) periode 2005-2014 meningkat sebesar 15,74% pertahun. Selama periode analisis perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD) terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 526.442.077.649,- atau mengalami penurunan sebesar 15,93% dari tahun sebelumnya. Sedangkan perkembangan PAD terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 43,34%, kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya penerimaan dari komponen Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu penerimaan Pajak Daerah meningkat sebesar 39,26%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 74,41%, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 302.12%. Sedangkan di Restribusi Daerah mengalami penurunan sebesar (76.62)%.

**Tabel 1. Perkembangan PAD Provinsi Jambi Periode 2005-2014**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	%
2005	344,880,740,000	-
2006	385,042,840,000	11.65
2007	451,050,873,389	17.14
2008	626,176,820,426	38.83
2009	526,442,077,649	(15.93)
2010	686,629,362,313	30.43
2011	984,232,579,912	43.34
2012	995,202,289,115	1.11
2013	1,063,879,903,502	6.90
2014	1,318,523,706,212	23.94
<b>Rata-rata</b>	<b>738,206,119,252</b>	<b>15.74</b>

Sumber : BPKAD Prov. Jambi Tahun 2005-2014

### Analisis Kemandirian Keuangan Provinsi Jambi

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada: (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat yang harus seminimal mungkin. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi, salah satunya dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah. Analisis Rasio Keuangan Daerah yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur tingkat kemampuan Fiskal atau derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi. Derajat kemampuan fiskal atau derajat desentralisasi fiskal Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2:

**Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jambi**

TAHUN	PAD	TP	Rasio DDF	Ket
2005	344,880,740,000	748,820,790,000	46.06	Baik
2006	385,042,840,000	1,010,116,950,000	38.12	Cukup
2007	451,050,873,389	1,155,350,577,266	39.04	Cukup
2008	626,176,820,426	1,436,448,061,804	43.59	Baik
2009	526,442,077,649	1,353,900,464,682	38.88	Cukup
2010	686,629,362,313	1,640,185,857,678	41.86	Baik
2011	984,232,579,912	2,078,806,913,790	47.35	Baik
2012	995,202,289,115	2,662,697,133,694	37.38	Cukup
2013	1,063,879,903,502	2,886,262,906,136	36.86	Cukup
2014	1,318,523,706,212	3,202,340,025,939	41.17	Baik
<b>Rata-rata</b>	<b>738,206,119,252</b>	<b>1,817,492,968,099</b>	<b>41.03</b>	<b>Baik</b>

Sumber : BPKAD Prov. Jambi Tahun 2005-2014

Dari tabel perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Jambi selama periode 2005 - 2014, dapat dilihat bahwa tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Jambi Baik. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2005 - 2014 sebesar 41,03% hal ini berarti kemampuan fiskal atau Derajat Desentralisasi Fiskal dinyatakan baik dengan demikian kinerja anggaran juga baik. Pada tahun 2005 mencapai 46,06% kemudian tahun 2006 turun menjadi 38,12%. Tahun 2007 naik menjadi 39,04%, pada tahun 2008 kembali naik menjadi 43,59%. Kenaikan terjadi di Tahun 2011 sebesar 47,35%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang peraturan penyusunan anggaran dari anggaran berimbang kepada anggaran kinerja. Oleh karena itu Provinsi Jambi harus berusaha untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada tanpa dipengaruhi oleh perubahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah peraturan dan ketentuannya.

### *Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah*

Rasio ketergantungan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah tersebut pada pemerintah yang lebih tinggi.

Berdasarkan Tabel 3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selama periode tahun 2005 - 2014 sebesar 54,28%. Hal ini berarti Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Jambi cukup besar. Pada tahun 2006 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 61,88% (kategori cukup besar), tahun 2008 turun menjadi 51,92%, tahun 2011 turun menjadi 51,72%, tahun 2014 turun lagi menjadi 47,29%.

**Tabel 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Tahun	Dana Perimbangan	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan	Ket
2005	393,688,550,000	748,820,790,000	52.57	Cukup Besar
2006	625,074,110,000	1,010,116,950,000	61.88	Cukup Besar
2007	686,556,648,877	1,155,350,577,266	59.42	Cukup Besar
2008	745,860,901,379	1,436,448,061,804	51.92	Cukup Besar
2009	802,060,279,933	1,353,900,464,682	59.24	Cukup Besar
2010	932,205,659,790	1,640,185,857,678	56.84	Cukup Besar
2011	1,075,207,719,996	2,078,806,913,790	51.72	Cukup Besar
2012	1,341,202,292,809	2,662,697,133,694	50.37	Cukup Besar
2013	1,487,559,863,316	2,886,262,906,136	51.54	Cukup Besar
2014	1,514,518,389,008	3,202,340,025,939	47.29	Cukup Besar
<b>Rata-rata</b>	<b>960,393,441,511</b>	<b>1,817,492,968,099</b>	<b>54.28</b>	<b>Cukup Besar</b>

Sumber : BPKAD Prov. Jambi Tahun 2005-2014

### *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah*

Rasio Kemandirian Keuangan daerah kalau dilihat dari Dana Transfer Pusat selama periode 2005-2014 rata-rata sebesar 70,19%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jambi dalam kategori sedang. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan



Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi pula.

**Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	PAD/DTP	Ket
2005	344,880,740,000	403,940,050,000	85.38	Tinggi/Delegatif
2006	385,042,840,000	625,074,110,000	61.60	Sedang/Partisipatif
2007	451,050,873,389	704,299,703,877	64.04	Sedang/Partisipatif
2008	626,176,820,426	810,271,241,378	77.28	Tinggi/Delegatif
2009	526,442,077,649	827,458,387,033	63.62	Sedang/Partisipatif
2010	686,629,362,313	953,556,495,365	72.01	Sedang/Partisipatif
2011	984,232,579,912	1,094,574,333,878	89.92	Tinggi/Delegatif
2012	995,202,289,115	1,667,494,844,579	59.68	Sedang/Partisipatif
2013	1,063,879,903,502	1,822,383,002,634	58.38	Sedang/Partisipatif
2014	1,318,523,706,212	1,883,816,319,727	69.99	Sedang/Partisipatif
<b>Rata-rata</b>	<b>738,206,119,252</b>	<b>1,079,286,848,847</b>	<b>70.19</b>	<b>Sedang/Partisipatif</b>

Sumber : BPKAD Prov. Jambi Tahun 2005-2014

#### *Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah*

Untuk menganalisis efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari hubungan antara hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggapan semua kewajiban pajak/retribusi dapat dibayar. Untuk melihat efektifitas dapat digunakan formula dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana realisasi sama dengan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal yang mampu dikumpulkan dalam satu tahun anggaran tertentu. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan nilai objek dikali tarif.

**Tabel 5. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	PAD/DTP	Ket
2005	283,589,737,270	344,880,740,000	82.23	Tidak Efektif
2006	336,590,283,408	385,042,840,000	87.42	Tidak Efektif
2007	382,082,234,637	451,050,873,389	84.71	Tidak Efektif
2008	454,441,987,272	626,176,820,426	72.57	Tidak Efektif
2009	498,167,990,389	526,442,077,649	94.63	Tidak Efektif
2010	535,753,443,786	686,629,362,313	78.03	Tidak Efektif
2011	641,658,215,660	984,232,579,912	65.19	Tidak Efektif
2012	753,366,207,083	995,202,289,115	75.70	Tidak Efektif
2013	902,554,697,570	1,063,879,903,502	84.84	Tidak Efektif
2014	1,208,837,984,507	1,318,523,706,212	91.68	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>599,704,278,158.20</b>	<b>738,206,119,251.80</b>	<b>81.70</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber : BPKAD Prov. Jambi Tahun 2005-2014

Tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dari tahun 2005-2014 berfluktuasi dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 81,70%. Pada tahun 2009 tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 94,63%, pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 78,02%, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali menjadi 65,19%, pada tahun 2012 ada peningkatan

sebesar 75,70%, kemudian tahun 2013 dan tahun 2014 kembali mengalami peningkatan masing-masing 84,84% dan 91,68%.

Dari hasil perhitungan diatas bahwa tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tidak efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan diperoleh masing-masing tahun angka kurang dari 100%.

### **Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi**

Dalam konteks negara kesatuan desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah.

Disisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan disisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat pada pemerintah keuntuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Berdasarkan teori *Tiebout Model* yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna.

Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial yang merespon perbedaan-perbedaan regional dan lokal mungkin akan lebih efektif dalam mempertinggi pembangunan ekonomi daripada kebijakan-kebijakan sentralisasi yang bisa jadi mengabaikan perbedaan-perbedaan antar daerah tersebut. Hal ini dapat dibenarkan sebab pemerintah Kabupaten/Kota mengetahui daerahnya lebih baik daripada yang diketahui oleh pemerintah pusat (Sumarsono dan Utomo, 2009).

Bank Dunia (1997) mengemukakan hubungan yang mungkin terjadi antara Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yaitu, desentralisasi akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal mempunyai dampak meningkatkan instabilisasi makro ekonomi sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta, desentralisasi fiskal untuk suatu daerah bisa berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghitung besaran nilai hubungan antara tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, digunakan alat uji Korelasi Pearson. Hasil estimasi uji Korelasi Pearson diperoleh :

**Tabel 6. Korelasi Pearson**

		RDDF	RKETER.	RKEM	REPAD	PE
RDDF	Pearson Correlation	1	-.301	.999**	-.570	.097
	Sig. (2-tailed)		.397	.000	.085	.790
	N	10	10	10	10	10
RKETER.	Pearson Correlation	-.301	1	-.307	.318	-.599
	Sig. (2-tailed)	.397		.389	.370	.067
	N	10	10	10	10	10
RKEM	Pearson Correlation	.999**	-.307	1	-.586	.107
	Sig. (2-tailed)	.000	.389		.075	.769
	N	10	10	10	10	10
REPAD	Pearson Correlation	-.570	.318	-.586	1	-.452
	Sig. (2-tailed)	.085	.370	.075		.189
	N	10	10	10	10	10
PE	Pearson Correlation	.097	-.599	.107	-.452	1
	Sig. (2-tailed)	.790	.067	.769	.189	
	N	10	10	10	10	10

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil pengujian dengan menggunakan uji korelasi pearson, Derajat Desentralisasi Fiskal dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif, atau semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besaran korelasi 0,097 berarti derajat desentralisasi fiskal berkorelasi sangat rendah dengan pertumbuhan ekonomi. Korelasi tidak signifikan (Probabilitas 0,790 lebih besar daripada 0,05), yang berarti antara derajat desentralisasi fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi tidak ada hubungan.

Ketergantungan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi negatif atau semakin rendah ketergantungan keuangan daerah maka diikuti dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Besaran korelasi sebesar -0,599, menunjukkan bahwa korelasi antara ketergantungan keuangan daerah menunjukkan hubungan sedang dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk tingkat signifikansinya menunjukkan nilai Sig (Probabilitas 0,067 lebih besar daripada 0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara ketergantungan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian dengan menggunakan uji korelasi pearson antara kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Angka korelasi sebesar 0,107 yang menunjukkan korelasi antara kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan sangat rendah, sedangkan untuk tingkat signifikansinya menunjukkan nilai Sig 0,769 jauh lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hasil korelasi negatif dengan angka korelasi sebesar -0,452 yang

menunjukkan bahwa korelasi efektivitas pendapatan asli daerah memiliki hubungan sedang dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk tingkat signifikansinya menunjukkan nilai Sig (Probabilitas 0,189 besar daripada 0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara efektivitas pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi tidak dapat diterima sepenuhnya. Hal ini karena dua dari empat hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi hasilnya negatif yaitu hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan ketergantungan keuangan daerah dan hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan efektivitas pendapatan asli daerah. Sedangkan signifikansi hasil korelasi semua rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan signifikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2005-2014 dianggap masih kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan rasio:
  - a. Rasio derajat desentralisasi fiskal, menunjukkan angka rata-rata sebesar 41,03% dinyatakan baik dengan demikian kinerja anggaran juga baik.
  - b. Rasio ketergantungan keuangan daerah, menunjukkan angka rata-rata sebesar 54,28% dinyatakan cukup besar.
  - c. Rasio kemandirian keuangan daerah menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 70,19% dengan pola hubungan yang sedang/partisipatif.
  - d. Berdasarkan efektivitas PAD, berada dalam interval kurang dari 100% yang berarti tidak efektif.
2. Berdasarkan hubungan rasio-rasio kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,097 (positif) dan berkorelasi sangat rendah dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ketergantungan keuangan daerah menunjukan negatif (-0,599) dengan tingkat hubungan sedang. Sementara kemandirian keuangan daerah adalah 0,107 dan berkorelasi sangat rendah dengan pertumbuhan ekonomi Sedangkan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) negatif (-0,452) dengan tingkat hubungan sedang. Untuk signifikansi hasil korelasi semua rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan signifikan.

### **Saran**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian keuangan daerah diperlukan agar tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui kebijakan-kebijakan daerah.

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan

- mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.
2. Perlu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan PAD.
  3. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya, agar dapat meningkatkan sumber-sumber PAD dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Namun juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait termasuk desentralisasi kewenangan perizinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.
  4. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Meningkatkan target PAD berdasarkan analisis potensi riil daerah dan didiskusikan pada tahap perencanaan, tidak hanya dengan menaikkan target, meningkatkan perolehan PAD terutama dengan mengoptimalkan pencapaian pada komponen pajak dan retribusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Barata, Adya dan Trihartono, Bambang. (2004). *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta: Gramedia
- Basri, Faisal (1995) *Perekonomian Indonesia Abad XXI*, Erlangga. Jakarta
- Bastian, Indra (2002) *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba 4: Jakarta
- Davey K.J (1988), *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga,* Penerbit UIPress.
- Devas, Nick, Binder, Brian, Both, Anne, Davoy, Kennet, Kelly, Roy (1989), *titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, Rajawali Pers : Jakarta*
- Davoodi H, Zou H. 1998. Fiscal decentralization and economic growth: a cross-country study. *Journal of Urban Economics*. 43(2):244-245.
- Djojohadikusuma, Soemitro (1994), *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES : Jakarta
- Halim, Abdul (2001). *Anggaran daerah dan fiscal stress: Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di daerah*. JEBI, XVI(4). 2008
- Halim, Abdul, (2004), *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Edisi Revisi
- Halim, Abdul (2007) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikhsan, M dan Santosa. Agus dan Harmanti. Cetakan ketiga, (2007). *Administrasi keuangan publik*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Josef Riwu Kaho (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta : Rajawali Press
- Mahmudi, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta

- Mankiw NG. 2007. Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo (2011) Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Oates WE. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*. 1999(37): 1120-1149
- Rekso Hadiprojo, Sukanto (2000) Ekonomi Publik Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Suparmoko. 1998. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE
- Sjafrijal (1997), Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, Nomor 37
- Suparmoko (2002) Ekonomi Publik (untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah). ANDI. Yogyakarta.
- Siahaan P, Marihot (2005) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grafindo
- Sukirno, Sadono (2006) Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sugiyono (2011) Statistik Nonparametris. Alfabeta, Bandung
- Samimi AJ, Lar SKP, Haddad GK, Alizadeh M. 2010. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 4(11): 5490-5495.
- Tibeout CM. 1961. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. *National Bureau of Economiz Research*. 1961: 79-96
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Cetakan kedua, (2007). Manajemen publik, Jakarta. Grasindo
- Todaro, Michel P (1995) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta
- Widjaya, HAW (2005), Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyo, Joko (2007), Dampak Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia, Fakultas Ekonomi UPN "Veteran", Yogyakarta
- Yani,Achmad, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2004 - 2014), Jambi Dalam Angka Tahun 2004-2014
- Balitbang Depdagri dan Fisifol UGM. (1991). Pengukuran kemampuan daerah Tingkat II dalam rangka otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri RI dan Fisipol Universitas Gajah Mada
- Depdagri (1997), Kepmendagri No. 690.900.237 (1996). Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Radianto. 1997. Otonomi keuangan daerah tingkat II: Suatu studi di Maluku. Prisma Nomor 3
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah